

PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK

Bebeng Subekti

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: *bebengsubekti@gmail.com

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi dikarenakan berbagai faktor, diantaranya dapat terjadi dikarenakan faktor teknis dan faktor pengendara atau manusianya sendiri. Kecelakaan lalu lintas seringkali merugikan baik secara materiil maupun immaterial, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penanganan kecelakaan lalu lintas merupakan tugas dan tanggungjawab Kepolisian yang harus dengan segera melakukan penanganan apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Polres Tasikmalaya. Landasarn teori yang digunakan berdasarkan pendapat Edward III dimana faktor penting dalam implementasi kebijakan dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mengungkap faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tentang penanganan kecelakaan lalu lintas oleh pihak Kepolisian Polres Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan masih kurangnya petugas dibandingkan dengan luas wilayah hukum Polres Tasikmalaya, serta dukungan sarana dan prasarana yang masih kurang, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif. Sementara faktor pendukung diantaranya sikap yang dimiliki para petugas cukup profesional serta adanya kewenangan yang jelas dimiliki oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Porles Tasikmalaya.

Kata kunci: Implementasi kebijakan dan Kecelakaan Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Kecelakaan di jalan raya merupakan hal yang paling tidak diinginkan yang dapat menimpa pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas yang terus terjadi sampai saat ini belum menjadi sebuah pelajaran berharga bagi pengguna jalan lainnya, dimana pada umumnya para pengguna jalan raya cukup paham dengan aturan umum dan tindakan keselamatan saat menggunakan jalan raya, tetapi kelalaian sebagian pengguna jalan menyebabkan kecelakaan dan tabrakan. Penyebab utama kecelakaan dan tabrakan seringkali diakibatkan oleh kesalahan manusia dibandingkan dengan masalah teknis.

Faktor pengemudi atau pengguna jalan lainnya dapat menjadi sebab adanya kecelakaan lalu lintas, diantaranya kurangnya perhatian pengemudi, adanya gangguan yang menyebabkan kurangnya konsentrasi dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya yang menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Pengemudi memiliki kewajiban untuk mengemudi dengan hati-hati dan menghindari cedera yang dapat diperkirakan terjadi pada pengendara lain, namun demikian tidak semua pengemudi berhasil menjalankan tugas tersebut, yang berujung pada kecelakaan di jalan raya.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas diantaranya kecepatan, dimana pada saat ini kecepatan kendaraan memicu terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan faktor pengendaranya. Peningkatan kecepatan melipatgandakan risiko kecelakaan dan tingkat keparahan cedera dalam kecelakaan. Kendaraan yang lebih cepat lebih rentan terhadap kecelakaan daripada kendaraan yang lebih lambat dan tingkat keparahan kecelakaan juga akan lebih tinggi pada kendaraan yang lebih cepat. Tingkat keparahan kecelakaan juga akan lebih tinggi jika kendaraan lebih cepat, dimana semakin tinggi kecepatannya, semakin besar risikonya.

Faktor selanjutnya pengemudi kurang konsentrasi dalam mengendarai kendaraannya, seperti kurang tidur atau dalam keadaan mabuk. Selain kurang tidur atau istirahat, alkohol dan obat-obatan, atau sejenisnya dapat mempengaruhi keterampilan dan konsentrasi yang diperlukan untuk seorang mengemudi. Meskipun dapat dianggap sebagai gangguan kecil pada saat mengemudi, hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan besar.

Faktor selanjutnya terjadi dikarenakan gangguan yang berada di luar atau di dalam kendaraan, seperti penggunaan Telepon Seluler pada saat mengemudikan kendaraan sehingga mengurangi konsentrasi dan gagal fokus menjadikan reaksi berkurang dan kemampuan serta keterampilan berkendara jadi berkurang yang menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Pengemudi tidak boleh terganggu oleh hal-hal ini dan mengurangi kecepatan agar tetap aman selama pengalihan dan jenis gangguan luar lainnya. Faktor lainnya yaitu melanggar rambu-rambu lalu lintas, serta kurang disiplinnya pengendara dalam menggunakan sabuk pengaman dan penggunaan pelindung diri seperti helm bagi pengguna kendaraan bermotor, disamping masih terjadinya kelebihan muatan.

Mengenakan sabuk pengaman dan helm dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari adanya kecelakaan lalu lintas pada pengemudi maupun penumpangnya. Peralatan keselamatan membuat pengemudi tetap utuh dan aman jika terjadi kecelakaan yang tidak terlalu parah. Perlengkapan keselamatan dari standar yang ditentukan harus digunakan dan dipasang dengan benar untuk keselamatan secara maksimal. Ketidaksiplinan pengemudi terhadap ketentuan pada saat mengemudi kendaraan bermotor menjadi faktor utama yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas, sehingga tidak dapat dipungkiri faktor manusia menjadi penyebab utama dari adanya kecelakaan lalu lintas.

Penanganan kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu tugas dari pihak kepolisian melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Pihak Kepolisian melalui Satlantas harus dengan segera melakukan penanganan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Upaya penanganan segera dalam penanganan kecelakaan lalu lintas juga telah dilaksanakan oleh pihak Satlantas Polres Tasikmalaya yang diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai hambatan, diantaranya dalam penanganan secara segera terhadap kejadian perkara, faktor komunikasi masih menjadi hambatan, dengan kurangnya penyampaian informasi dari lokasi kejadian ke pihak Kepolisian Sektor (Polsek) setempat dari masyarakat dikarenakan luasnya wilayah hukum Polres Tasikmalaya dan dapat diterima oleh Satlantas Polres Tasikmalaya.

Faktor selanjutnya dari ketersediaan anggota Satlantas dan sarana prasarana yang belum memadai, sebagai contoh terbatasnya anggota Satlantas dalam setiap penanganan kejadian perkara yang dapat diterjunkan secara langsung ke lapangan terlebih lokasi kejadian cukup jauh dari Polres Tasikmalaya. Faktor penghambat lainnya dimana secara struktur organisasi, penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas terutama kejadian berat harus selalu ditangani oleh pihak Satlantas Polres Tasikmalaya sehingga menyulitkan petugas terutama lokasi kejadian perkara atau kecelakaan lalu lintas yang cukup jauh dikarenakan luasnya wilayah hukum Polres Tasikmalaya.

LANDASAN TEORI

Kebijakan publik umumnya terdiri dari serangkaian tindakan dalam bentuk rencana, peraturan, dan tindakan yang diadopsi oleh pemerintah. Kebijakan publik berfokus pada keputusan yang menghasilkan keluaran dari sistem politik, seperti kebijakan transportasi, menjalankan layanan kesehatan masyarakat, mengelola sistem sekolah, dan mengatur kekuatan pertahanan dan peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki sifat mengikat dan memaksa agar kehidupan masyarakat dapat tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam masyarakat mana pun, entitas pemerintah memberlakukan undang-undang, mengembangkan kebijakan, dan mengalokasikan sumber daya di semua tingkatan. Kebijakan publik dapat didefinisikan secara luas sebagai sistem undang-undang, melakukan pengaturan, rencana aksi, dan prioritas pendanaan mengenai subjek tertentu yang diberlakukan oleh entitas pemerintah atau perwakilannya.

Definisi dari kebijakan (Hoogerwerf 1992) dengan menyatakan: "Kebijakan adalah semacam jawaban atas pertanyaan suatu persoalan, dan kebijakan merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah masalah dengan cara tertentu, atau tindakan terarah". Kebijakan merupakan seperangkat prinsip, gagasan atau rencana yang memandu keputusan untuk mencapai hasil tertentu. Kebijakan itu penting karena dapat membentuk cara untuk melakukan sesuatu, menentukan cara berperilaku dan cara untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jika

dapat mengubah dasar-dasar yang memandu keputusan, maka akan memiliki peluang lebih baik untuk mencapai dan mempertahankan tujuan di masa depan.

Laswell (Kencana 2006) menjelaskan bahwa: "Kebijakan adalah tugas para intelektual sebagai pengambilan keputusan, termasuk penjelasan tujuan, penjelasan tren, analisis kondisi, prediksi pengembangan dan penelitian masa depan, evaluasi dan penelitian, evaluasi dan pemilihan berbagai kemungkinan". Kebijakan dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui program-program kebijakan untuk memecahkan berbagai permasalahan secara terarah dan terpadu.

Kebijakan seringkali lebih merupakan asumsi; implementasi mengubah kebijakan menjadi program aksi. Kebijakan lahir dari ide, seringkali dengan tujuan yang tidak jelas dan mungkin bertentangan. Kebijakan menunjukkan rantai peristiwa penyebab yang diinginkan, antara kondisi awal dan konsekuensi masa depan yang diinginkan. Implementasi adalah rencana aksi untuk menjembatani kesenjangan antara keduanya. Pelaksananya dapat dilakukan oleh aktor formal maupun informal, antara lain legislator, pengadilan, birokrasi, kelompok penekan, organisasi masyarakat, bahkan perseorangan.

Menurut Easton (Anderson 1997) menyatakan: "Kebijakan yaitu berhubungan dengan *political system theory* yang mengidentifikasi institusi dan aktivitas di dalam sebuah masyarakat yang membuat keputusan autoritatif yang terkait dalam suatu masyarakat, intinya bahwa kebijakan publik merupakan hasil perjuangan kelompok". Selanjutnya Easton (Anderson 1997) memberikan pengertian tentang kebijakan dengan menjelaskan bahwa kebijakan adalah salah satu bentuk jawaban atas suatu masalah dengan meminta individu atau kelompok melaksanakannya dengan cara yang tepat dan menggunakan serangkaian tindakan atau upaya yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi publik. Menurut Dye (Kusnandar 2012) menyatakan: "Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan". Setiap kebijakan publik harus dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan, dan banyak faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya.

Ada dua teori utama yang saling bersaing tentang implementasi kebijakan. Pertama, implementasi merupakan kelanjutan dari perencanaan rasional dan proses pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil. Pandangan ini melihat implementasi kebijakan sebagai kelanjutan dari desain organisasi yang rasional, dengan hasil yang diketahui dan pasti. Teori lainnya adalah model interaktif, yang menurutnya implementasi kebijakan merupakan kelanjutan dari kebijakan yang berakibat pada adopsi kebijakan publik dan hasilnya tidak pasti.

Keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut diantaranya sebagaimana

dikemukakan oleh Edward III (Kusnandar 2012) meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Dari keempat faktor tersebut memiliki hubungan satu sama lainnya dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan.

METODE

Penelitian termasuk ke dalam penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang bertujuan untuk pemahaman mendalam tentang fenomena yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah sosial. Dalam penelitian kualitatif berfokus pada mengapa daripada apa yang terjadi dari fenomena sosial yang mengacu pada pengalaman langsung manusia sebagai pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya dengan mereduksi data, mendisplay data, melakukan penarikan kesimpulan dan memverifikasi dari data yang terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik secara umum dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh publik, sehingga dengan adanya kebijakan dapat terselesaikan sesuai dengan harapan semua pihak. Penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas harus dilakukan dengan segera oleh pihak Kepolisian, yang menjadi tugas dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan tingkat kejadian kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya masih cukup tinggi. Dari data yang diperoleh dari Satuan Lalu Linta Polres Tasikmalaya tingkat kejadian perkara pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1
Data Laka Lantas Bulan Januari Sampai Dengan Desember 2021

No	Bulan	Jumlah kejadian	Korban			Kerugian Material (Rp.)
			Meninggal dunia	Luka berat	Luka ringan	
1.	Januari	11	7	5	12	10.500.000
2.	Februari	7	2	1	8	33.600.000
3.	Maret	7	5	1	3	16.400.000
4.	April	10	6	0	14	24.400.000
5.	Mei	12	7	2	12	16.400.000
6.	Juni	12	11	0	8	10.600.000
7.	Juli	4	2	1	3	2.000.000
8.	Agustus	11	7	1	18	10.000.000
9.	September	8	4	0	10	6.200.000
10.	Oktober	6	6	0	3	2.800.000
11.	November	8	3	0	44	19.300.000

12.	Desember	10	4	0	11	3.800.000
	Jumlah	106	64	11	146	156.000.000

Sumber : Laka Lantas Polres Tasikmalaya 2022.

Berdasarkan data di atas menunjukkan selama tahun 2021, dengan jumlah kejadian sebanyak 106 kasus, dengan dengan korban meninggal dunia sebanyak 64 jiwa, sementara dengan luka berat sebanyak 11 orang, sedangkan luka ringan sebanyak 146 orang. Adapun tingkat kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor periode Januari sampai dengan Juni 2022 masih cukup tinggi dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.
Data Laka Lantas Bulan Januari Sampai Dengan Juni 2022

No	Bulan	Jumlah kejadian	Korban			Kerugian Material (Rp.)
			Meninggal dunia	Luka berat	Luka ringan	
1	Januari	9	4	1	9	10.300.000
2	Februari	10	5	0	9	19.800.000
3	Maret	13	3	0	16	15.200.000
4	April	13	7	0	13	15.600.000
5	Mei	13	10	0	11	13.450.000
6	Juni	16	6	1	19	12.400.000
Jumlah		74	35	2	77	86.750.000

Sumber : Laka Lantas Polres Tasikmalaya 2022.

Dari data di atas menunjukkan untuk periode Januari sampai dengan Juni 2022 terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 74 kasus kejadian, dengan korban meninggal dunia sebanyak 35 jiwa, luka ringan 2 orang dan luka berat 77 orang. Sebagai upaya meminimalkan berbagai hal yang tidak diinginkan dari setiap kejadian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor perlu adanya tindakan yang cepat dan segera di pihak Satlantas Polres Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam peraturan yang berlaku. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan setiap kejadian perkara kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Satlantas yang bersifat segera, belum sepenuhnya dapat terlaksana sesuai dengan tujuan kebijakan.

Berdasarkan penelitian ini dari aspek komunikasi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas Satlantas Polres Tasikmalaya dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan segera, hal tersebut dikarenakan luasnya wilayah hukum Polres Tasikmalaya sehingga faktor komunikasi menjadi hambatan tersendiri. Untuk melakukan komunikasi anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya menggunakan media elektronik berupa HT dan Handphone (HP) atau Smartphone. Setiap anggota selalu mencatat dengan baik lokasi perkara, situasi dan kondisi untuk melengkapi bahan dan peralatan yang akan digunakan sebelum berangkat ke tempat kejadian atau kecelakaan lalu lintas.

Komunikasi yang efektif mengarah pada hasil kerja yang efisien dan efektif. Penanganan di tempat kejadian perkara (TKP) dapat segera dilakukan jika informasi

yang diterima lengkap dan akurat, sehingga memudahkan anggota untuk segera meluncur ke TKP. Pentingnya komunikasi dalam suatu organisasi dapat meningkatkan motivasi dengan cara menginformasikan dan mengklarifikasi kepada setiap anggota organisasi tentang tugas-tugas yang ada, bagaimana melaksanakan tugas-tugas tersebut. Komunikasi membantu untuk bersosialisasi, karena tidak ada yang dapat dihasilkan tanpa komunikasi. Melalui komunikasi, membantu mengawasi proses pelaksanaan tugas masing-masing individu dalam organisasi.

Faktor selanjutnya dilihat dari aspek ketersediaan sumberdaya, yang meliputi kecukupan anggota Kepolisian pada Satlantas Polres Tasikmalaya dan kelengkapan sarana dan prasarana, serta ketesediaan informasi yang cukup dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan yang berlaku. Dari hasil penelitian ini menunjukkan sumber daya yang dimiliki oleh Satlantas Polres Tasikmalaya dalam penanganan kecelakaan lalu lintas untuk dapat dilaksanakan segera, menunjukkan masih adanya hambatan diantaranya keterbatasan anggota pada unit kecelakaan lalu lintas dibandingkan dengan luas wilayah hukum Polres Tasikmalaya. Untuk kejadian kecelakaan lalu lintas yang jauh dari Polres Tasikmalaya tentu akan membutuhkan waktu untuk sampai ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), sehingga memerlukan komunikasi dan koordinasi dengan anggota yang ada pada Polsek terdekat dengan TKP.

Dalam pelaksanaan kebijakan faktor pendukung utama yaitu ketersediaan sumber daya manusia sebagai implementornya, yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kebijakan. Secara umum sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan menjadi sangat penting, dimana dapat terdiri dari bahan berwujud dan aset berwujud yang mendukung program, peningkatan kinerja, dan peningkatan layanan, termasuk pendanaan yang memadai dan stabil, ketersediaan personil, fasilitas dan peralatan yang lengkap, ketersediaan teknologi yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas, serta sumber daya informasi dan materi program. Dari semua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam mencapai pelaksanaan tugas dari organisasi.

Sementara dari faktor disposisi atau sikap dari para anggota pada Satlantas dalam mengimplementasikan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas berkaitan dengan Tata Cara Mendatangi Tempat Kejadian Perkara Dengan Segera di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya memiliki respon yang baik dan selalu siap melaksanakan tugas sebagaimana diperintahkan oleh pimpinannya, serta sejalan dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya.

Secara struktur, penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya berada dalam kewenangan Satuan Lalu Lintas (Satlantas), sehingga berdasarkan faktor struktur birokrasi telah mendukung terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang disertai dengan standar operasional prosedurnya dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Pembagian tugas dan kewenangan sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga tidak terjadinya

tumpah tindih dalam pelaksanaan tugas pekerjaan, disamping adanya SOP dalam setiap pelaksanaan tugas terutama berkaitan dengan pelayanan kepada publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas tentang Tata Cara Mendatangi Tempat Kejadian Perkara Dengan Segera di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya ditentukan oleh faktor komunikasi meliputi media penyampaian informasi, kejelasan informasi dari pemangku kebijakan ke pelaksana kebijakan dan konsistensi terhadap isi kebijakan, selanjutnya faktor sumber daya meliputi ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dan ketersediaan informasi tentang kebijakan, sementara faktor disposisi atau sikap pelaksana meliputi kemampuan pelaksana kebijakan, kompetensi pelaksana kebijakan dan konsistensi dari pelaksana kebijakan, sedangkan faktor struktur birokrasi meliputi adanya pembagian tugas yang jelas, tanggungjawab pelaksana kebijakan, adanya Standar Operasional prosedur (SOP).

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson. 1997. *Pembuatan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hoogerwerf. 1992. *Ilmu Pemerintahan*. diedit oleh Tobing. Jakarta: Erlangga.
Kencana, Syafiie Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
Kusnandar, Ishak. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Multazam.